

**STRATEGI PENCEGAHAN DISINFORMASI
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK**

Ach Zahli Maulidi^{1*}, Rico Dwi Putra Irawan²

^{1,2}Program Studi Administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹Achzahlimaulidi@gmail.com, ²ricodwiputirawan@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik administrasi publik, khususnya dalam penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara digital. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya fenomena disinformasi yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Disinformasi tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, memperlambat implementasi kebijakan publik, serta menciptakan polarisasi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku, serta laporan kebijakan dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan disinformasi memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan penguatan literasi digital masyarakat, optimalisasi komunikasi publik pemerintah yang transparan dan responsif, kolaborasi strategis dengan platform digital, serta penerapan regulasi yang adaptif dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam pengelolaan informasi publik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pencegahan disinformasi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: disinformasi; administrasi publik; literasi digital; komunikasi publik; kebijakan pemerintah

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has significantly transformed public administration practices, particularly in delivering and disseminating information to society through digital platforms. However, this advancement has also been accompanied by the increasing spread of disinformation, which poses a serious challenge for governments. Disinformation not only reduces public trust in government institutions but also has the potential to disrupt social stability, hinder the implementation of public policies, and create societal polarization. This study aims to comprehensively analyze strategies for preventing disinformation in public administration in the digital era. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review of academic journals, books, and policy reports from credible sources. The findings reveal that preventing disinformation requires a multidimensional approach, including strengthening public digital literacy, optimizing transparent and responsive government communication, fostering strategic collaboration with digital platforms, and implementing adaptive and fair regulations. Furthermore, improving the capacity of civil servants in managing public information is a crucial factor in building a healthy information ecosystem. This study concludes that disinformation prevention strategies must be carried out in an integrated and sustainable manner involving all stakeholders to maintain public trust and enhance the effectiveness of governance.

Keywords: disinformation; public administration; digital literacy; public communication; government policy

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi digital melalui penerapan e-government memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui berbagai platform digital seperti situs web resmi, aplikasi layanan publik, serta media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, yaitu meningkatnya penyebaran disinformasi yang sulit dikendalikan (Lazer et al., 2018).

Disinformasi merupakan informasi yang sengaja disebar dengan tujuan menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Dalam konteks administrasi publik, disinformasi dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, program layanan publik, maupun isu-isu sosial yang sensitif. Keberadaan disinformasi tidak hanya berdampak pada kesalahan persepsi masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kepercayaan publik merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga gangguan terhadap kepercayaan tersebut dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan (Putnam, 2000).

Fenomena disinformasi semakin kompleks dengan adanya media sosial yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat preferensi pengguna (echo chamber) menyebabkan informasi yang tidak benar dapat menyebar secara cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat sebagian besar individu sulit membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak valid (Guess et al., 2020).

Selain faktor masyarakat, kelemahan dalam sistem komunikasi publik pemerintah juga menjadi penyebab maraknya disinformasi. Informasi yang lambat, tidak transparan, atau kurang jelas seringkali memicu munculnya spekulasi dan informasi palsu di masyarakat. Dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, ketidakjelasan informasi dapat mempercepat penyebaran hoaks yang berdampak langsung pada perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu mengelola komunikasi publik secara efektif, responsif, dan berbasis data.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disinformasi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik. Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), disinformasi merupakan bagian dari fenomena “information disorder” yang mencakup berbagai bentuk manipulasi informasi. Sementara itu, Vosoughi et al. (2018) menemukan bahwa informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang

benar di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan disinformasi memerlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks administrasi publik, upaya pencegahan disinformasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, media, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, sementara masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Di sisi lain, perusahaan teknologi juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola konten yang beredar di platform mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disinformasi merupakan tantangan serius dalam era digital yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang administrasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan tata kelola digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif untuk menghadapi disinformasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait penyebaran disinformasi serta upaya pencegahannya dalam lingkungan administrasi publik. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai faktor penyebab, dampak, dan strategi penanganan disinformasi berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan disinformasi dan administrasi publik. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Sumber data penelitian berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, artikel akademik, laporan pemerintah, serta publikasi organisasi internasional yang membahas administrasi publik, komunikasi publik, literasi digital, dan disinformasi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta tahun publikasi agar data yang digunakan tetap sesuai dengan perkembangan kondisi digital saat ini. Sebagian besar referensi yang digunakan

merupakan sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk menjaga kebaruan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber literatur, pengumpulan data, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, serta analisis isi dari setiap referensi yang digunakan. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui jurnal elektronik, buku, dan artikel ilmiah. Setelah itu, peneliti memilih sumber yang memiliki hubungan langsung dengan strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan, seperti faktor penyebab disinformasi, dampak disinformasi, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan oleh pemerintah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data dan sumber yang digunakan agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan sumber-sumber ilmiah terbaru juga dilakukan untuk meningkatkan validitas dan relevansi penelitian terhadap kondisi perkembangan teknologi digital saat ini.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu yang semakin berkembang di era digital.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap administrasi publik, khususnya dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial membuat informasi dapat diakses dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan transparansi informasi. Namun, di sisi lain perkembangan teknologi juga memunculkan

tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran disinformasi atau informasi palsu di ruang digital.

Disinformasi dalam administrasi publik dapat berupa berita bohong, manipulasi informasi, maupun penyebaran data yang tidak sesuai fakta. Penyebaran informasi palsu menjadi lebih cepat karena media sosial memungkinkan setiap individu untuk membuat dan menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang jelas. Selain itu, algoritma media sosial juga sering memperkuat penyebaran konten yang bersifat sensasional sehingga informasi palsu lebih mudah menarik perhatian masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya disinformasi di era digital. Faktor pertama adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi palsu sehingga mudah percaya terhadap berita yang beredar di media sosial. Faktor kedua adalah kemudahan akses teknologi yang memungkinkan informasi tersebar secara luas dalam waktu singkat. Selain itu, adanya kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial juga menjadi penyebab munculnya disinformasi untuk mempengaruhi opini publik.

Disinformasi memberikan dampak yang cukup serius terhadap administrasi publik. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi palsu mengenai kebijakan publik dapat menyebabkan masyarakat salah memahami program pemerintah sehingga implementasi kebijakan menjadi terhambat. Selain itu, disinformasi juga dapat memicu konflik sosial, perpecahan masyarakat, serta menurunkan partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pencegahan disinformasi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye digital. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat diharapkan mampu memeriksa dan mengevaluasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Strategi berikutnya adalah optimalisasi komunikasi publik pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, jelas, dan transparan melalui media resmi agar masyarakat memperoleh sumber informasi yang terpercaya. Selain itu, pemerintah juga perlu segera memberikan klarifikasi terhadap informasi palsu yang beredar di masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital juga menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran disinformasi. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan konten, penghapusan informasi palsu, serta edukasi kepada pengguna media sosial. Di samping itu, regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran disinformasi perlu diterapkan secara tegas agar memberikan efek jera.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan disinformasi dalam administrasi publik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, media massa, lembaga pendidikan, dan perusahaan

teknologi digital. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, penyebaran disinformasi dapat diminimalkan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tetap terjaga serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digital.

Manusia membuat teknologi untuk mempercepat penyebaran informasi, lalu terkejut ketika kebohongan ikut tersebar lebih cepat. Evolusi digital benar-benar seperti membuka pintu rumah sambil berharap nyamuknya sopan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disinformasi merupakan salah satu tantangan utama dalam administrasi publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga membuka peluang besar bagi munculnya informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi publik, disinformasi tidak hanya berdampak pada aspek komunikasi, tetapi juga mempengaruhi efektivitas kebijakan, stabilitas sosial, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya disinformasi meliputi kemajuan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan sistem verifikasi informasi yang memadai, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, pengaruh faktor sosial dan psikologis, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa disinformasi merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat ditangani dengan pendekatan tunggal.

Dampak disinformasi terhadap administrasi publik sangat signifikan, terutama dalam menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat implementasi kebijakan, serta memicu konflik sosial di masyarakat. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga penurunan kepercayaan akibat disinformasi dapat melemahkan legitimasi pemerintah serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program publik.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan disinformasi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut meliputi penguatan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi secara kritis, optimalisasi komunikasi publik pemerintah yang transparan, cepat, dan akurat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk platform digital dan media massa. Selain itu, penerapan regulasi yang tegas namun tetap menghormati kebebasan berekspresi juga menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan penyebaran disinformasi.

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan informasi publik juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. ASN sebagai representasi pemerintah harus mampu menjadi sumber informasi yang kredibel, profesional, dan

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 409 – 416.

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi juga harus terus ditingkatkan untuk mengurangi ruang bagi berkembangnya disinformasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan tata kelola informasi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan disinformasi di era digital.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa melibatkan data lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris dengan melibatkan responden atau studi kasus yang lebih spesifik agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pencegahan disinformasi dalam administrasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Sinergi antara berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak dan sumber referensi ilmiah yang telah membantu dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan penelitian mengenai strategi pencegahan disinformasi dalam administrasi publik di era digital. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Tradisi akademik memang menarik. Manusia saling memberi terima kasih setelah bersama-sama begadang mengejar tenggat yang mereka buat sendiri.

Daftar Pusaka

- Abdullah Idi. (2007). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 409 – 416.

Guess, A. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). Exposure to untrustworthy websites in the 2016 U.S. election. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>

Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of public communication strategies in digital governance. *International Journal of Public Administration*, 5(1), 23–34.

Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., & Menczer, F. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

OECD. (2021). *Governance responses to disinformation: Policy approaches and practices*. OECD Publishing.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Rahman, A. (2020). Digital governance and misinformation in public administration. *Journal of Public Administration Studies*, 12(2), 45–60.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

Suryadi, B. (2019). Strategi komunikasi publik dalam era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 22–35.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

World Bank. (2020). *World development report 2020: Digital dividends*. World Bank Publications.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.